

BAB II

LANDASAN TEORI

A. Hasil Penelitian Terdahulu

1. Kamaliah, 2023. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Pakapuran Kecil Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Program Studi Administrasi Publik Sekolah Tinggi Ilmu Administrasi Amuntai. Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui bagaimana partisipasi masyarakat dan faktor- faktor yang mempengaruhi dalam pembangunan di Desa Pakapuran Kecil Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan. Metode penelitian yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode deskriptif dengan pendekatan kualitatif. Penelitian ini menggunakan teknik Purposive Sampling dengan melibatkan 17 informan. Teknik analisis yang digunakan adalah reduksi data, penyajian data dan penarikan kesimpulan. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan di desa Pakapuran Kecil Kecamatan Daha Utara Kabupaten Hulu Sungai Selatan kurang baik dilihat dari tiga indikator cukup baik dan 6 indikator kurang baik, Faktor pendorong yaitu Fasilitas pembangunan digunakan masyarakat dengan baik dan Masyarakat memberikan ide atau gagasan dan faktor penghambat yaitu Pengetahuan masyarakat dan Pekerjaan masyarakat.
2. Prayogi Pangestu, 2020. Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Desa Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau. Fakultas Ilmu

Sosial dan Ilmu Politik, Universitas Mulawarman. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana fungsi partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Tanjung Batu Kecamatan Pulau Derawan Kabupaten Berau, hal ini ditekankan mengingat partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Tanjung Batu masih jauh dari kata maksimal, serta untuk mengetahui model partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Tanjung Batu. Jenis penelitian ini menggunakan penelitian kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Tanjung Batu berjalan dengan baik sesuai dengan 4 indikator partisipasi masyarakat dalam pembangunan desa yaitu. Partisipasi masyarakat melalui indikator assesment masyarakat terlibat dalam memberikan nilai-nilai dalam pembangunan atau mengidentifikasi masalah-masalah yang ada, serta terlibat dalam tahap perencanaan sehingga pembangunan yang dilaksanakan sesuai potensi masyarakat. Indikator alternatif program masyarakat terlibat memberikan usulan untuk alternatif program kebijakan pembangunan apabila pembangunan mendapatkan masalah. Indikator pelaksanaan masyarakat terlibat dalam pembangunan Desa Tanjung Batu untuk mendukung pembangunan yang dilaksanakan, masyarakat terlibat secara langsung maupun tidak langsung. Indikator Evaluasi masyarakat terlibat memberikan nilai-nilai terhadap pembangunan yang telah dilaksanakan, melalui input, proses, dan output masyarakat dapat memberikan usulannya. Sementara model partisipasi masyarakat dalam pembangunan Desa Tanjung Batu dikatakan campuran, partisipasi masyarakat Desa Tanjung Batu ada yang secara langsung terlibat

dalam pembangunan desa misalnya ada yang menyumbang uang atau alat, tenaga serta keterampilan mereka. Selain itu ada juga masyarakat yang terlibat secara tidak langsung misalnya menyumbang ide-ide pemikiran, pendapat dan pengambilan keputusan.

Novelty penelitian ini terletak pada analisis partisipasi masyarakat yang tidak hanya dilihat secara umum, tetapi dikaji secara mendalam berdasarkan tahapan pembangunan desa, mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengawasan, hingga pemanfaatan hasil pembangunan di Desa Baru Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah. Penelitian ini menekankan partisipasi substantif masyarakat, seperti kontribusi ide, tenaga, dan pengawasan sosial, bukan sekadar kehadiran dalam musyawarah. Selain itu, penelitian ini mengangkat perspektif langsung masyarakat untuk mengidentifikasi faktor pendorong dan penghambat partisipasi dalam konteks sosial dan budaya lokal, sehingga menghasilkan temuan empiris yang kontekstual serta rekomendasi praktis bagi penguatan pembangunan desa yang partisipatif dan berkelanjutan.

B. Tinjauan Teoritis

1. Partisipasi

Menurut Made Pidarta dalam Siti Irene Astuti D. (2019: 31-32), partisipasi adalah pelibatan seseorang atau beberapa orang dalam suatu kegiatan. Keterlibatan dapat berupa keterlibatan mental dan emosi serta fisik dalam menggunakan segala kemampuan yang dimilikinya (berinisiatif) dalam

segala kegiatan yang dilaksanakan serta mendukung pencapaian tujuan dan tanggungjawab atas segala keterlibatan.

Partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang di dalam situasi kelompok yang mendorong mereka untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggungjawab terhadap kelompoknya. Pendapat lain menjelaskan bahwa partisipasi merupakan penyertaan pikiran dan emosi dari pekerja-pekerja kedalam situasi kelompok yang bersangkutan dan ikut bertanggungjawab atas kelompok itu. Partisipasi juga memiliki pengertian *“a valuentary process by which people including disadvantaged (income, gender, ethnicity, education) influence or control the affect them”* Deepa Naryan (2016:12), artinya suatu proses yang wajar di mana masyarakat termasuk yang kurang beruntung (penghasilan, gender, suku, pendidikan) mempengaruhi atau mengendalikan pengambilan keputusan yang langsung menyangkut hidup mereka.

Partisipasi menurut Huneryear dan Heoman dalam Siti Irene Astuti D. (2019: 32) adalah sebagai keterlibatan mental dan emosional dalam situasi kelompok yang mendorongnya memberi sumbangan terhadap tujuan kelompok serta membagi tanggungjawab bersama mereka.

Pengertian sederhana tentang partisipasi dikemukakan oleh Fasli Djalal dan Dedi Supriadi (2021: 201-202), di mana partisipasi dapat juga berarti bahwa pembuat keputusan menyarankan kelompok atau masyarakat ikut terlibat dalam bentuk penyampaian saran dan pendapat, barang, keterampilan, bahan dan jasa. Partisipasi dapat juga berarti bahwa kelompok mengenal

masalah mereka sendiri, mengkaji pilihan mereka, membuat keputusan, dan memecahkan masalahnya.

H.A.R Tilaar (2019: 287) mengungkapkan partisipasi adalah sebagai wujud dari keinginan untuk mengembangkan demokrasi melalui proses desentralisasi dimana diupayakan antara lain perlunya perencanaan dari bawah (bottom-up) dengan mengikutsertakan masyarakat dalam proses perencanaan dan pembangunan masyarakatnya.

Partisipasi masyarakat menurut Isbandi (2017: 27) adalah keikutsertaan masyarakat dalam proses pengidentifikasian masalah dan potensi yang ada di masyarakat, pemilihan dan pengambilan keputusan tentang alternatif solusi untuk menangani masalah, pelaksanaan upaya mengatasi masalah, dan keterlibatan masyarakat dalam proses mengevaluasi perubahan yang terjadi.

Mikkelsen dalam Isbandi (2017: 27) membagi partisipasi menjadi 6 (enam) pengertian, yaitu:

- a. Partisipasi adalah kontribusi sukarela dari masyarakat kepada proyek tanpa ikut serta dalam pengambilan keputusan;
- b. Partisipasi adalah “pemekaan” (membuat peka) pihak masyarakat untuk meningkatkan kemauan menerima dan kemampuan untuk menanggapi proyek-proyek pembangunan;
- c. Partisipasi adalah keterlibatan sukarela oleh masyarakat dalam perubahan yang ditentukannya sendiri;
- d. Partisipasi adalah suatu proses yang aktif, yang mengandung arti bahwa orang atau kelompok yang terkait, mengambil inisiatif dan menggunakan kebebasannya untuk melakukan hal itu;
- e. Partisipasi adalah pemantapan dialog antara masyarakat setempat dengan para staf yang melakukan persiapan, pelaksanaan, monitoring proyek, agar supaya memperoleh informasi mengenai konteks lokal, dan dampak-dampak sosial;
- f. Partisipasi adalah keterlibatan masyarakat dalam pembangunan diri, kehidupan, dan lingkungan mereka.

Dari beberapa pakar yang mengungkapkan definisi partisipasi di atas, dapat dibuat kesimpulan bahwa partisipasi adalah keterlibatan aktif dari seseorang, atau sekelompok orang (masyarakat) secara sadar untuk berkontribusi secara sukarela dalam program pembangunan dan terlibat mulai dari perencanaan, pelaksanaan, monitoring sampai pada tahap evaluasi.

Pentingnya partisipasi dikemukakan oleh Conyers (2019:154-155) sebagai berikut: pertama, partisipasi masyarakat merupakan suatu alat guna memperoleh informasi mengenai kondisi, kebutuhan, dan sikap masyarakat setempat, yang tanpa kehadirannya program pembangunan serta proyek-proyek akan gagal; kedua, bahwa masyarakat akan lebih mempercayai proyek atau program pembangunan jika merasa dilibatkan dalam proses persiapan dan perencanaannya, karena mereka akan lebih mengetahui seluk-beluk proyek tersebut dan akan mempunyai rasa memiliki terhadap proyek tersebut; ketiga, bahwa merupakan suatu hak demokrasi bila masyarakat dilibatkan dalam pembangunan masyarakat mereka sendiri.

2. Partisipasi Masyarakat

a. Pengertian

Partisipasi adalah proses pemberian sumbangsih sukarela dari suatu kelompok masyarakat dalam pengambilan sebuah keputusan dimana masyarakat tentunya harus melibatkan emosi dan mental dalam mewujudkan suatu tujuan yang akan mensejahterakan kehidupan mereka. Lukmanul Hakim, (2016:50) partisipasi merupakan keterlibatan mental dan emosi dari seseorang didalam situasi kelompok yang mendorong mereka

untuk menyokong kepada pencapaian tujuan kelompok tersebut dan ikut bertanggung jawab terhadap kelompoknya. Partisipasi masyarakat menjadi hal penting dalam mencapai keberhasilan dan keberlanjutan program pembangunan. Partisipasi berarti keikutsertaan seseorang atau kelompok masyarakat dalam suatu kegiatan secara sadar.

Pembahasan selanjutnya adalah tentang apa yang dimaksud dengan kata partisipasi. Dengan mengutip ungkapan-ungkapan dari Kamus Oxford, mulai membahas partisipasi dalam "tindakan atau fakta mengambil bagian dalam, memiliki atau membentuk bagian dari". Dalam pengertian ini, partisipasi dapat bersifat transitif atau intransitif, bermoral atau tidak bermoral.

Sari P (2021:95) yang menjabarkan bahwa pokok partisipasi dalam kegiatan yang diadakan oleh masyarakat adalah efektifitas dan efisiensi kelompok. Dengan kata lain, partisipasi masyarakat harus efektif dan berhasil, dan tidak dapat mengatur kepentingan pribadi beberapa kelompok karena dengan lebih. Agar secara langsung atau tidak langsung terkait dengan kebijakan yang akan diambil harus dilibatkan, motivasi penting di balik kontribusi desa adalah untuk masukan dan saran yang bermanfaat bagi penduduk dan jaringan yang tertarik (kepentingan umum) agar pengambilan keputusan berkualitas, karena dengan mempengaruhi individu yang mungkin terpengaruh oleh pendekatan dan kebijakan pihak yang berkepentingan, pilihan dinamis dibuat. Persyaratan dan asumsi untuk jaringan dan pertemuan ini dapat ditangkap dan kemudian digabungkan

menjadi sebuah ide. Pada sisi lain, opini dan tanggapan masyarakat akan membantu pengambilan pilihan (mitra) untuk mengidentifikasi prioritas dan kepentingan, dan peran masyarakat juga merupakan etikal politik yang memandang masyarakat sebagai sumber kekuatan dan kekuasaan.

Winardil (2019:79) yang mengemukakan “partisipasi merupakan turut sertanya seseorang baik secara mental maupun emosional untuk memberikan sumbangan kepada proses pembuatan keputusan terutama mengenai persoalan-persoalan dimana keterlibatan pribadi orang yang bersangkutan melaksanakan tanggung jawab untuk melakukan hal tersebut”. Selain itu menurut peneliti “partisipasi merupakan keterlibatan secara spontan yang disertai kesadaran dan tanggung jawab terhadap kepentingan kelompok untuk mencapai tujuan bersama”.

Beberapa unsur penting yang terdapat dalam partisipasi, yaitu: partisipasi berarti partisipasi mental dan emosional, bukan partisipasi fisik, yang akan membangkitkan kesadaran sehingga dapat meningkatkan partisipasi, kemudian partisipasi mengajak orang lain untuk ikut andil dalam mendukung kehidupannya, nantinya menjadi bagian dari masyarakat akan berdampak pada kelangsungan hidup kelompok dalam mencapai tujuan bersama, berpartisipasi dalam kegiatan yang mendorong seseorang untuk bertanggung jawab atas kebaikan bersama. Karena apa yang diberikan dilakukan dengan sukarela, ia membawa penyertaan penghargaan diri ke dalam organisasi.

Menurut Yadav dalam Theresia (2016:198) Partisipasi Masyarakat ada 4 variabel yaitu:

- 1) Partisipasi dalam pengambilan keputusan
Partisipasi dalam pengambilan keputusan adalah keterlibatan masyarakat dalam proses merumuskan kebijakan, menentukan prioritas pembangunan, dan memilih program yang akan dijalankan. Bentuk

partisipasi ini mencerminkan demokrasi dan transparansi, di mana suara dan aspirasi masyarakat diakomodasi dalam proses perencanaan pembangunan.

- 2) Partisipasi dalam pelaksanaan Kegiatan
Ini merujuk pada keterlibatan masyarakat secara aktif dalam melaksanakan program atau proyek pembangunan yang telah disepakati. Partisipasi ini bisa berupa tenaga, waktu, dana, atau bentuk kontribusi lainnya.
- 3) Partisipasi dalam Pemantauan dan evaluasi pembangunan
Partisipasi ini berarti masyarakat turut serta dalam mengawasi jalannya pembangunan agar sesuai dengan rencana, anggaran, dan kebutuhan yang telah ditetapkan. Evaluasi dilakukan untuk menilai keberhasilan, dampak, dan efisiensi pembangunan.
- 4) Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan
Partisipasi ini mencakup keterlibatan masyarakat dalam menggunakan, merawat, dan mengembangkan hasil-hasil pembangunan agar memberikan manfaat berkelanjutan. Ini menandakan keberhasilan pembangunan karena hasilnya benar-benar digunakan oleh masyarakat.

Josef Riwu (2017:127) berpendapat partisipasi masyarakat dapat terjadi pada empat jenjang yaitu pertama, partisipasi dalam pengambilan keputusan. Kedua, partisipasi dalam pelaksanaan. Ketiga, partisipasi dalam pemanfaatan. Keempat, partisipasi dalam evaluasi.

- 1) Partisipasi dalam proses pembuatan keputusan. Setiap proses penyelenggaraan, terutama dalam kehidupan bersama masyarakat, pasti melewati tahap penentuan kebijaksanaan. Partisipasi masyarakat pada tahap ini sangat mendasar sekali, terutama karena yang di ambil menyangkut nasib mereka secara keseluruhan yang menyangkut kepentingan bersama. Partisipasi dalam hal pengambilan keputusan ini bermacam-macam, seperti kehadiran rapat, diskusi, sumbangan pemikiran, tanggapan atau penolakan terhadap program yang ditawarkan.
- 2) Partisipasi dalam pelaksanaan. Partisipasi masyarakat dalam pelaksanaan program merupakan lanjutan dari rencana yang telah disepakati sebelumnya. Dalam hal ini bahwa partisipasi dalam pembangunan ini dapat dilakukan melalui keikutsertaan masyarakat dalam memberikan kontribusi guna menunjang pelaksanaan pembangunan yang berwujud tenaga, uang, barang, material, maupun informasi yang berguna bagi pelaksanaan pembangunan.
- 3) Partisipasi dalam pengambilan manfaat. Partisipasi ini tidak terlepas dari kualitas maupun kuantitas dari hasil pelaksanaan program yang bisa

dicapai. Dari segi kualitas, keberhasilan suatu program akan ditandai dengan adanya peningkatan output, sedangkan dari segi kuantitas dapat dilihat seberapa besar persentase keberhasilan program yang dilaksanakan, apakah sesuai dengan target yang telah ditetapkan. Partisipasi dalam menikmati hasil dapat dilihat dari tiga segi, yaitu dari aspek manfaat materialnya, manfaat sosialnya dan manfaat pribadi.

- 4) Partisipasi dalam evaluasi. Partisipasi dalam evaluasi ini berkaitan dengan masalah pelaksanaan program secara menyeluruh. Partisipasi ini bertujuan untuk mengetahui apakah pelaksanaan program telah sesuai dengan yang ditetapkan atau ada penyimpangan.

Siti Fatimah (2018:21) tipologi partisipasi masyarakat yaitu:

- 1) Partisipasi pasif/manipulatif dengan karakteristik masyarakat diberitahu apa yang sedang atau telah terjadi, pengumuman sepihak oleh pelaksana proyek tanpa memperhatikan tanggapan masyarakat dan informasi yang diperlukan terbatas pada kalangan profesional di luar kelompok sasaran.
- 2) Partisipasi informatif memiliki karakteristik dimana masyarakat menjawab pertanyaan-pertanyaan penelitian, masyarakat tidak diberi kesempatan untuk terlibat dan mempengaruhi proses penelitian dan akurasi hasil penelitian tidak dibahas bersama masyarakat.
- 3) Partisipasi konsultatif dengan karakteristik masyarakat berpartisipasi dengan cara konsultasi, tidak ada peluang membuat keputusan bersama, dan profesional tidak berkewajiban untuk mengajukan pandangan (sebagai masukan) atau tindak lanjut.
- 4) Partisipasi intensif memiliki karakteristik masyarakat memberikan korbanan atau jasanya untuk memperoleh imbalan berupa intensif/upah. Masyarakat tidak dilibatkan dalam proses pembelajaran atau eksperimen yang dilakukan dan masyarakat tidak memiliki andil untuk melanjutkan kegiatan-kegiatan setelah intensif dihentikan.
- 5) Partisipasi fungsional memiliki karakteristik masyarakat membentuk kelompok untuk mencapai tujuan proyek, pembentukan kelompok biasanya setelah ada keputusan-keputusan utama yang disepakati, pada tahap awal masyarakat tergantung terhadap pihak luar namun secara bertahap menunjukkan kemandiriannya.
- 6) Partisipasi interaktif memiliki ciri dimana masyarakat berperan dalam analisis untuk perencanaan kegiatan dan pembentukan penguatan kelembagaan dan cenderung melibatkan metode interdisipliner yang mencari keragaman perspektif dalam proses belajar mengajar yang terstruktur dan sistematis. Masyarakat memiliki peran untuk mengontrol atas (pelaksanaan) keputusan-keputusan mereka, sehingga memiliki andil dalam keseluruhan proses kegiatan.
- 7) *Self mobilization* (mandiri) memiliki karakter masyarakat mengambil inisiatif sendiri secara bebas untuk mengubah sistem dan nilai-nilai yang

mereka miliki. Masyarakat mengembangkan kontak dengan pihak-pihak lain untuk mendapatkan bantuan-bantuan teknis dan sumberdaya yang diperlukan. Masyarakat memegang kendali atas pemanfaatan sumberdaya yang ada dan atau digunakan.

Sedangkan Effendi (Sari, 2016: 60) membagi partisipasi dalam dua bentuk, yaitu:

- 1) Partisipasi vertical. Disebut partisipasi vertikal karena terjadi dalam bentuk kondisi tertentu masyarakat terlibat atau mengambil bagian dalam suatu program pihak lain, dalam hubungan dimana masyarakat berada sebagai status bawahan, pengikut atau klien.
- 2) Partisipasi Horizontal, dalam partisipasi horizontal, masyarakat mempunyai prakarsa sendiri dimana setiap orang atau kelompok masyarakat berpartisipasi horizontal satu dengan yang lainnya. Partisipasi semacam ini merupakan tanda pemulaan timbulnya masyarakat yang mampu berkembang secara mandiri.

Sementara itu, bentuk-bentuk partisipasi masyarakat juga dijelaskan oleh Huraerah (Septyasa, 2018: 6) yaitu:

- 1) Partisipasi buah pikiran.
- 2) Partisipasi tenaga, yang diberikan partisipan dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain dan sebagainya.
- 3) Partisipasi harta benda, yang diberikan orang dalam berbagai kegiatan untuk perbaikan atau pembangunan desa, pertolongan bagi orang lain yang biasanya berupa uang, makanan dan sebagainya.
- 4) Partisipasi keterampilan dan kemahiran.
- 5) Partisipasi sosial, yang diberikan orang sebagai tanda keguyuban.

Dari pengertian di atas dapat disimpulkan bahwa partisipasi masyarakat adalah keterlibatan anggota masyarakat dalam pembangunan dan pelaksanaan (implementasi) program atau proyek pembangunan yang dilakukan dalam masyarakat lokal. Partisipasi masyarakat memiliki ciri-ciri bersifat proaktif dan bahkan reaktif (artinya masyarakat ikut menalar baru bertindak), ada kesepakatan yang dilakukan oleh semua yang terlibat, ada

tindakan yang mengisi kesepakatan tersebut, ada pembagian kewenangan dan tanggung jawab dalam kedudukan yang setara.

b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Partisipasi Masyarakat

Marhum (2021:141) berpendapat bahwa faktor-faktor yang mempengaruhi partisipasi masyarakat ialah: Pertama, pendidikan, kapasitas untuk membaca dan menulis, kebutuhan, posisi, posisi sosial, dan tidak adanya keberanian. Kedua, adalah faktor dalam pemahaman yang dangkal tentang negara. Ketiga, kecenderungan untuk salah mengartikan inspirasi, tujuan dan kepentingan asosiasi rakyat yang biasanya mendorong munculnya pandangan yang salah tentang keinginan dan motivasi serta organisasi penduduk (pemerintah yang memiliki wewenang) dan kekurangan posisi terbuka untuk mengambil bagian dalam program perbaikan yang berbeda. Selain itu partisipasi yang tumbuh dalam masyarakat dipengaruhi oleh banyak faktor internal lain. Faktor -faktor yang mempengaruhi kecenderungan seseorang dalam berpartisipasi, yaitu:

- 1) Usia Faktor usia merupakan faktor yang mempengaruhi sikap seseorang terhadap kegiatan-kegiatan kemasyarakatan yang ada. Mereka dari kelompok usia menengah ke atas dengan keterikatan moral kepada nilai dan norma masyarakat yang lebih mantap, cenderung lebih banyak yang berpartisipasi daripada mereka yang dari kelompok usia lainnya.
- 2) Jenis Kelamin Nilai yang cukup lama dominan dalam kultur berbagai bangsa mengatakan bahwa pada dasarnya tempat perempuan adalah “di

dapur” yang berarti bahwa dalam banyak masyarakat peranan perempuan yang terutama adalah mengurus rumah tangga, akan tetapi semakin lama nilai peran perempuan tersebut telah bergeser dengan adanya gerakan emansipasi dan pendidikan perempuan yang semakin baik.

- 3) Pendidikan Dikatakan sebagai salah satu syarat mutlak untuk berpartisipasi. Pendidikan dianggap dapat mempengaruhi sikap hidup seseorang terhadap lingkungannya, suatu sikap yang diperlukan bagi peningkatan kesejahteraan seluruh masyarakat.
- 4) Pekerjaan dan Penghasilan Hal ini tidak dapat dipisahkan satu sama lain karena pekerjaan seseorang akan menentukan berapa penghasilan yang akan diperolehnya. Pekerjaan dan penghasilan yang baik dan mencukupi kebutuhan sehari-hari dapat mendorong seseorang untuk berpartisipasi dalam kegiatan-kegiatan masyarakat. Pengertiannya bahwa untuk berpartisipasi dalam suatu kegiatan, harus didukung oleh suasana yang mapan perekonomian.
- 5) Lamanya Tinggal Lamanya seseorang tinggal dalam lingkungan tertentu dan pengalamannya berinteraksi dengan lingkungan tersebut akan berpengaruh pada partisipasi seseorang. Semakin lama ia tinggal dalam lingkungan tertentu, maka rasa memiliki terhadap lingkungan cenderung lebih terlihat dalam partisipasinya yang besar dalam setiap kegiatan lingkungan tersebut.

Pamuji (2017:497) mengatakan bahwa sifat dan ciri-ciri partisipasi merupakan kepentingan yang harus disengaja, isu-isu berbeda harus diperkenalkan dan diperiksa dengan jelas dan tidak memihak, kesempatan untuk mengambil bagian harus mendapatkan data yang jelas dan memuaskan tentang setiap perspektif/bagian dari program yang akan dibicarakan dan dukungan daerah setempat untuk memutuskan keyakinan diri itu sendiri harus mencakup tingkat yang berbeda dan bidang yang berbeda, bersifat dewasa, signifikan, dan ekonomis serta terkait erat dengan kemajuan. Tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat dalam proses memajukan desa, mensyaratkan adanya kepercayaan dan kesempatan yang diberikan pemerintah kepada masyarakat untuk terlibat secara aktif didalam proses pembangunan. Tumbuh dan berkembangnya partisipasi masyarakat, ditentukan tiga unsur pokok, yaitu:

- 1) Adanya kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, untuk berpartisipasi
- 2) Adanya kemauan masyarakat untuk berpartisipasi dan
- 3) Adanya kemampuan masyarakat untuk berpartisipasi.

Adanya unsur kesempatan yang diberikan kepada masyarakat, pada umumnya berkaitan dengan kemauan politik (*political will*) pemerintah untuk melibatkan masyarakat dalam pembangunan. Sehubungan dengan hal tersebut, ada tiga variasi bentuk partisipasi masyarakat, yaitu:

- 1) Partisipasi terbatas, partisipasi yang hanya digerakkan untuk kegiatan-kegiatan tertentu demi tercapainya tujuan pembangunan,

- 2) Partisipasi penuh, partisipasi seluas-luasnya dalam segala aspek kegiatan pembangunan dan
- 3) Mobilisasi tanpa partisipasi, partisipasi yang dibangkitkan pemerintah,

c. Prinsip-Prinsip Partisipasi Masyarakat

Adapun prinsip-prinsip partisipasi tersebut, sebagaimana tertuang dalam Panduan Pelaksanaan Pendekatan Partisipatif yang disusun oleh *Department for International Development (DFID)* (dalam Monique Sumampouw, 2016: 106-107) adalah:

- 1) Cakupan. Semua orang atau wakil-wakil dari semua kelompok yang terkena dampak dari hasil-hasil suatu keputusan atau proses proyek pembangunan.
- 2) Kestaraan dan kemitraan (*Equal Partnership*). Pada dasarnya setiap orang mempunyai keterampilan, kemampuan dan prakarsa serta mempunyai hak untuk menggunakan prakarsa tersebut dalam setiap proses guna membangun dialog tanpa memperhitungkan jenjang dan struktur masing-masing pihak.
- 3) Transparansi. Semua pihak harus dapat menumbuhkembangkan komunikasi dan iklim berkomunikasi terbuka dan kondusif sehingga menimbulkan dialog.
- 4) Kestaraan kewenangan (*Sharing Power/Equal Powership*). Berbagai pihak yang terlibat harus dapat menyeimbangkan distribusi kewenangan dan kekuasaan untuk menghindari terjadinya dominasi.

- 5) Kestaraan Tanggung Jawab (*Sharing Responsibility*). Berbagai pihak mempunyai tanggung jawab yang jelas dalam setiap proses karena adanya kestaraan kewenangan (*Sharing power*) dan keterlibatannya dalam proses pengambilan keputusan dan langkah-langkah selanjutnya.
- 6) Pemberdayaan (*Empowerment*). Keterlibatan berbagai pihak tidak lepas dari segala kekuatan dan kelemahan yang dimiliki setiap pihak, sehingga melalui keterlibatan aktif dalam setiap proses kegiatan, terjadi suatu proses saling belajar dan saling memberdayakan satu sama lain.
- 7) Kerjasama. Diperlukan adanya kerja sama berbagai pihak yang terlibat untuk saling berbagi kelebihan guna mengurangi berbagai kelemahan yang ada, khususnya yang berkaitan dengan kemampuan sumber daya manusia.

3. Pembangunan

Pengertian pembangunan harus kita lihat secara dinamis, dan bukan dilihat sebagai konsep statis. Pembangunan adalah suatu orientasi dan kegiatan usaha yang tanpa akhir. Proses pembangunan sebenarnya adalah merupakan suatu perubahan sosial ekonomi. Pembangunan agar dapat menjadi suatu proses yang dapat bergerak maju atau kekuatan sendiri tergantung kepada manusia dan struktur sosialnya. Jadi, bukan hanya yang dikonsepsikan sebagai usaha pemerintah belaka.

Proses pembangunan menghendaki adanya pertumbuhan ekonomi yang diikuti dengan perubahan (*growth plus change*) dalam perubahan struktur

ekonomi, dari pertanian ke industri atau jasa, perubahan kelembagaan, baik lewat regulasi maupun reformasi kelembagaan. Pembangunan secara berencana lebih dirasakan sebagai suatu usaha yang lebih rasional dan teratur bagi pembangunan masyarakat yang belum atau baru berkembang. (Subandi: 2019:9-11)

Adapun pembangunan menurut beberapa ahli yaitu : pembangunan menurut Rochajat (2019:3) adalah perubahan yang berguna menuju suatu sistem sosial dan ekonomi yang diputuskan sebagai kehendak suatu bangsa.

Selanjutnya menurut Rostow dalam Abdul (2019:89) pembangunan merupakan proses yang bergerak dalam sebuah garis lurus, yakni dari masyarakat terbelakang ke masyarakat negara yang maju.

Rochajat (2019:3) Pembangunan mula-mula dipakai dalam arti pertumbuhan ekonomi. Sebuah masyarakat dinilai berhasil melaksanakan pembangunan, bila pertumbuhan ekonomi masyarakat tersebut cukup tinggi. Dengan demikian, yang diukur adalah produktivitas masyarakat atau produktivitas negara setiap tahunnya.

Dalam bidang sosial, usaha-usaha pembangunan pada umumnya diarahkan untuk mengembangkan nilai-nilai dan sikap-sikap dalam masyarakat yang lebih kondusif bagi pembaharuan, pembangunan, pembangunan dan pembinaan bangsa. Dalam hal ini termasuk pengembangan motivasi kegairahan usaha yang bersifat produktif. Dan yang lebih penting adalah dapat dikembangkan suatu proses pendewasaan masyarakat melalui pembinaan dan dorongan serta adanya energi.

Usaha dalam bidang ekonomi ditujukan untuk menambah peralatan modal dan keterampilan agar satu sama lain dapat saling mendukung usaha-usaha dalam peningkatan pendapatan perkapita serta produktivitas perkapita. Pemupukan modal sangat tergantung pada tabungan dalam negeri, terutama tabungan masyarakat, untuk itu berbagai upaya perlu diupayakan untuk mencapainya. Subandi (2019:13) mengatakan bahwa keberhasilan pembangunan ekonomi ditunjukkan oleh 3 nilai pokok, yaitu:

- 1) Berkembangnya kemampuan masyarakat untuk memenuhi kebutuhan pokoknya (*basic needs*),
- 2) Meningkatnya rasa harga diri (*self-esteem*) masyarakat sebagai manusia, dan
- 3) Meningkatnya kemampuan masyarakat untuk memilih (*freedom from servitude*).

Pembangunan merupakan suatu kenyataan fisik sekaligus tekad suatu masyarakat untuk berupaya sekeras mungkin melalui serangkaian kombinasi proses sosial, ekonomi dan institusional, demi mencapai kehidupan yang serba lebih baik.

4. Pembangunan Desa

a. Pengertian

Dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pasal 78 ayat (1) Pembangunan desa bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat desa dan kualitas hidup manusia serta penanggulangan kemiskinan melalui pemenuhan kebutuhan dasar, pembangunan sarana dan

prasarana Desa, pengembangan potensi ekonomi lokal, serta pemanfaatan sumber daya alam dan lingkungan secara berkelanjutan.

Pembangunan desa pada hakikatnya mengedepankan kebersamaan, kekeluargaan, dan kegotongroyongan guna mewujudkan pengarusutamaan perdamaian dan keadilan sosial.

Desa menyusun perencanaan pembangunan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/kota. Dokumen rencana Pembangunan Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa dan sebagai dasar penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa. Perencanaan Pembangunan Desa diselenggarakan dengan mengikutsertakan masyarakat Desa melalui Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa. Musyawarah Perencanaan Pembangunan Desa menetapkan prioritas, program, kegiatan, dan kebutuhan swadaya masyarakat Desa, dan/atau Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten/kota berdasarkan penilaian terhadap kebutuhan masyarakat Desa.

Menurut Sjafrizal (2016:15) perencanaan pembangunan daerah pada dasarnya adalah bersifat multidisipliner karena cakupannya yang luas meliputi aspek geografi, ekonomi, sosial, budaya, politik, pemerintahan, dan fisik. Karena itu, penyusunan perencanaan pembangunan daerah memerlukan suatu tim perencana yang mempunyai beberapa keahlian dalam ilmu terkait seperti Planologi, Teknik, Ekonomi, Pertanian, Hukum, Pemerintahan, dan Sosial Budaya.

Pembangunan Desa dilaksanakan oleh Pemerintah Desa dan masyarakat desa dengan semangat Gotong royong serta memanfaatkan kearifan lokal dan sumber daya alam Desa. Pelaksanaan program sektor

yang masuk ke Desa diinformasikan kepada Pemerintah Desa dan diintegrasikan dengan rencana Pembangunan Desa. Masyarakat Desa berhak mendapatkan informasi dan melakukan pemantauan mengenai rencana dan pelaksanaan Pembangunan Desa.

Pembangunan kawasan pedesaan dilaksanakan dalam upaya mempercepat dan meningkatkan kualitas pelayanan, pembangunan, dan pemberdayaan masyarakat Desa di kawasan pedesaan. Pembangunan kawasan pedesaan meliputi:

- 1) Penggunaan dan pemanfaatan wilayah Desa dalam rangka penetapan kawasan pembangunan sesuai dengan tata ruang kabupaten/kota;
- 2) Pelayanan yang dilakukan untuk meningkatkan kesejahteraan masyarakat perdesaan;
- 3) Pembangunan infrastruktur, peningkatan ekonomi perdesaan, dan pengembangan teknologi tepat guna; dan
- 4) Pemberdayaan masyarakat Desa untuk meningkatkan akses terhadap pelayanan dan kegiatan ekonomi.

Ada tiga prinsip pokok pembangunan perdesaan, yaitu:

- 1) Kebijakan dan langkah-langkah pembangunan di setiap desa mengacu kepada pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan Trilogi pembangunan. Ketiga unsure Trilogi pembangunan tersebut yaitu:
 - a) Pemerataan pembangunan dan hasil-hasil;
 - b) Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi; dan

- c) Stabilitas yang sehat dan dinamis, diterapkan disetiap sektor, termasuk desa dan kota, disetiap wilayah secara saling terkait, serta dikembangkan secara selaras dan terpadu.
- 2) Pembangunan desa dilaksanakan dengan prinsip-prinsip pembangunan yang berkelanjutan.
- 3) Meningkatkan efisiensi masyarakat melalui kebijakan deregulasi, debirokrasi dan desentralisasi dengan sebaik-baiknya.

Sesuai dengan Undang-undang No. 6 Tahun 2014 Tentang Desa bahwa Pembangunan Desa meliputi tahap perencanaan, Pelaksanaan, dan Pengawasan. Pasal 79 mengenai Perencanaan Pembangunan Desa:

- 1) Pemerintah Desa menyusun perencanaan pembangunan Desa sesuai dengan kewenangannya dengan mengacu pada perencanaan pembangunan Kabupaten/Kota.
- 2) Perencanaan pembangunan Desa sebagaimana maksud ayat (1) disusun secara berjangka meliputi: a. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun; dan b. Rencana Pembangunan Tahunan Desa atau yang disebut Rencana Kerja Pemerintah Desa, merupakan penjabaran dari Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
- 3) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Peraturan Desa.

- 4) Peraturan Desa tentang Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan satu-satunya dokumen perencanaan di Desa.
- 5) Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa merupakan pedoman dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa yang diatur dalam Peraturan Pemerintah.
- 6) Program Pemerintah dan/atau Pemerintah Daerah yang berskala lokal Desa dikoordinasikan dan/atau didelegasikan pelaksanaannya kepada Desa.
- 7) Perencanaan Pembangunan Desa sebagaimana dimaksud ayat (1) merupakan salah satu sumber masukan dalam perencanaan pembangunan kabupaten/kota.

b. Pembangunan Infrastruktur Desa (Fisik)

Infrastruktur adalah sebuah sistem fasilitas publik yang bersifat fundamental di tujukan kepada masyarakat/khalayak ramai untuk melayani dan memudahkan masyarakat.

Menurut Sondang P. Siagian (2019:34) Pembangunan infrastruktur merupakan suatu usaha atau rangkaian usaha pertumbuhan dan perubahan yang dilakukan secara terencana untuk membangun prasarana atau segala sesuatu yang merupakan penunjang utama terselenggaranya suatu proses pembangunan.

Definisi ini mengimplikasikan adanya perbedaan lapisan dari stuktur yang ada, ibaratnya menyediakan support atau layanan (*service*). Dalam

dunia fisik, terminologi infrastruktur kadang merujuk kepada keperluan-keperluan publik, seperti air, listrik, gas, pembuangan air, dan layanan telepon. Infrastruktur memiliki beberapa karakteristik tertentu, termasuk:

- 1) Digunakan bersama-sama (shared) oleh pengguna yang lebih luas, ketimbang stuktur-struktur yang didukungnya.
- 2) Lebih statis dan permanen ketimbang struktur-struktur yang didukungnya.
- 3) Lebih dipandang sebagai sebuah service (considered a service), termasuk orang-orang dan proses yang dilibatkan dalam support, lebih dari sekedar sebuah struktur atau perlengkapan (device) fisik.
- 4) Terkadang terhubung secara fisik ke struktur yang didukungnya.
- 5) Terpisah (distinct) dari strktur-struktur yang didukungnya dalam hal kepemilikannya dan orang-orang.

Sedangkan menurut Kuncoro (2020:20), Infrastruktur mengacu pada sistem fisik yang menyediakan transportasi, air, bangunan, dan fasilitas publik lain yang diperlukan untuk memenuhi kebutuhan dasar manusia secara ekonomi dan sosial. Pembangunan fisik adalah pembangunan yang dapat di rasakan langsung oleh Masyarakat atau pembangunan yang tampak oleh mata misalnya berupa Infrastruktur, bangunan, fasilitas umum dan lainnya.

Infrastruktur memegang peranan penting sebagai salah satu roda penggerak pertumbuhan ekonomi dan pembangunan. Keberadaan infrastruktur yang memadai sangat diperlukan. Sarana dan prasarana fisik, atau sering disebut dengan infrastruktur merupakan bagian yang sangat penting dalam sistem pelayanan masyarakat. Keberadaan infrastruktur yang baik memiliki peran yang sangat penting dalam menunjang pemenuhan hak

dasar masyarakat seperti pangan, sandang, papan, pendidikan dan kesehatan. Dengan demikian, dapat dikatakan bahwa infrastruktur merupakan modal yang sangat dibutuhkan masyarakat dalam mendukung kegiatan diberbagai bidang.

c. Pembangunan Infrastruktur Desa (Non Fisik)

Didalam pembangunan suatu wilayah bukan hanya melakukan program pembangunan yang bergerak dibidang pembanguan fisik saja tetapi juga harus bergerak dibidang pembangunan non fisik atau sosial. Bachtiar Effendi (2020:114) oleh karena itu, pembangunan hendaknya harus adanya keseimbangan antara pembangunan fisik ataupun pembangunan non fisiknya. Yang menjadi bagian dari pembangunan non fisik atau sosial yaitu:

- 1) Pembangunan manusia
- 2) Ekonomi
- 3) Pendidikan.

Pembangunan non fisik berkaitan dengan penggunaan sumber daya manusia itu sendiri. Adapun pembangunan antara lain pembangunan di bidang kesehatan, pembangunan di bidang pendidikan, pembangunan di bidang ekonomi dan lain sebagainya. Pembangunan non fisik mengedepankan sumberdaya manusia, dikarenakan dengan adanya pembangunan non fisik menjadi dasar untuk melakukan pembangunan fisik.

Usaha dibidang pembangunan non fisik dapat dijalankan dengan cara membimbing atau guiding, cara persuasi melalui telinga dan mata (audio visual), dan dapat dengan cara memberi stimulasi. Ketiga cara tersebut dilakukan agar masyarakat dapat tergugah untuk menimbulkan daya gerak serta dapat memberikan contoh konkrit pembangunan yang sebenarnya, sehingga pembangunan dapat berjalan dengan baik.

Kondisi non fisik terdiri dari atas aspek-aspek sosial budaya politik, dan religi. Aspek sosial budaya dalam arti sempit merupakan adat istiadat, kebiasaan-kebiasaan yang hidup dalam masyarakat yang masih ditaati. Misalnya kegiatan gotong royong, yang merupakan kekuatan berproduksi dan kekuatan membangun atas dasar kerja sama dan saling berpengertian.

D. Kerangka Pemikiran

Peraturan Bupati Hulu Sungai Tengah Nomor 17 Tahun 2017 Tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa Dan Rencana Kerja Pemerintah Desa Bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 89 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Desa, perlu mengatur tentang Petunjuk Teknis Penyusunan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa dan Rencana Kerja Pemerintah Desa dengan Peraturan Bupati.

Mengingat pentingnya Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Di Desa Baru Kecamatan Batu Benawa Kabupaten Hulu Sungai Tengah peneliti memfokuskan pada teori Yadav dalam Theresia (2016:198) Partisipasi dalam pengambilan keputusan, Partisipasi dalam pelaksanaan Kegiatan, Partisipasi

dalam Pemantauan dan evaluasi pembangunan dan Partisipasi dalam pemanfaatan hasil pembangunan. Adapun kerangka pikir tersebut dapat dilihat pada gambar 2.1 sebagai berikut:

Gambar 2.1
Kerangka Pemikiran

